

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2016 TENTANG STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN
(BABS) DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
(STUDI KASUS DI DESA PANYIURAN DAN KERAMAT)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

SAHID

NPM : 2022271

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama :

NAMA : Sahid
NPM : 2022271
PROGRAM STUDI : S1 Administrasi Publik
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR
4 TAHUN 2016 TENTANG STOP BUANG AIR
BESAR SEMBARANGAN (BABS) DI
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI
KASUS DI DESA PANYIURAN DAN KERAMAT)

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat
menyetujui Proposal Skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan kepembimbing
Skripsi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

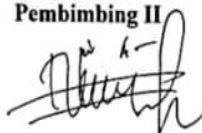
Amuntai, 2 April 2026

Pembimbing I



Muhamad Arsyad, S.Pd.I, M.AP.
NUPTK. 5636753654130102

Pembimbing II



Nor Ainah, M.E.
NUPTK.. 3637774675230202



Mengetahui
Kep. Prodi Administrasi Publik

Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A
NIK. 199211004 201509 021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	8
B. Tinjauan Teoritis	10
1. Konsep Kebijakan Publik	10
2. Konsep Implementasi Kebijakan.....	16
3. Pengertian Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	27
C. Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Lokasi Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Tipe Penelitian	34
D. Data dan Sumber Data.....	35
E. Desain Operasional Penelitian.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Analisis Data.....	41
H. Uji Kredibilitas Data.....	42
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	36
Tabel 3. 2	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan suatu masyarakat. Semakin tinggi dan terjamin kesehatan suatu masyarakat, maka tinggi pula kesejahteraannya. Kesehatan juga merupakan hak asasi manusia, dimana setiap masyarakat berhak mendapatkan perhatian mengenai kesehatannya, baik kesehatan masyarakatnya maupun kesehatan lingkungannya. Mengingat betapa pentingnya kesehatan tersebut setiap daerah mengemban dan berupaya mengatasi permasalahan kesehatan di daerah masing-masing, termasuk daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) diharapkan dapat meningkatkan kesehatan di daerah tersebut. Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan, yang selanjutnya disingkat Gerakan Stop BABS adalah kebijakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan perubahan perilaku yang *hygiene* dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan Sanitasi yang buruk secara terus menerus akan menyebabkan terjadinya penyebaran penyakit berbasis lingkungan seperti *Diare*, *Thypoid*, Penyakit Kulit, Hepatitis A dan lain sebagainya, sedangkan dari aspek kerugian ekonomi dari dampak buruknya sanitasi. Mengingat betapa pentingnya kesehatan tersebut setiap daerah mengemban dan berupaya untuk mengatasi permasalahan kesehatan di

daerah masing-masing termasuk daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) diharapkan dapat meningkatkan kesehatan di daerah tersebut. Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan, yang selanjutnya disingkat Gerakan Stop BABS adalah kebijakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan perubahan perilaku yang hygiene dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM) yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan Sanitasi yang buruk secara terus menerus akan menyebabkan kejadian penyakit-penyakit berbasis lingkungan yang seperti *Diare*, *Thypoid*, Penyakit Kulit, *Hepatitis A* dan lain sebagainya, sedangkan dari aspek kerugian ekonomi dari dampak buruknya sanitasi.

Program ini adalah bertujuan untuk meningkatkan angka kesehatan masyarakat dalam pembangunan sanitasi di Indonesia, yang menekankan pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku untuk mencapai perilaku higienis dan sanitasi secara mandiri guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pilar pertama dari Lima Pilar STBM adalah Stop Buang Air Besar Sembarangan, yang merupakan upaya pemberdayaan masyarakat desa untuk secara mandiri mengubah kebiasaan hidup sehat.

Pada tahun 2018-2021 Desa Panyiuran adalah salah satu penerima bantuan WC gratis yang alokasi dari APBN yang berasal dari program dinas kesehatan dan program DAK (Dana Alokasi Khusus) sanitasi. Jumlah keseluruhan rumah 143 buah dan 30 rumah yang belum mempunyai WC

sanitasi sehingga melibatkan masyarakatnya masih ada menggunakan jamban, sedangkan Desa Keramat merupakan penerima bantuan WC gratis sekitar tahun 2020, yang mana jumlah keseluruhan rumah sekitar 157 buah dengan sudah menggunakan WC sanitasi dan dari tahun 2021 sampai sekarang masyarakat desa Keramat dianjurkan untuk tidak lagi menggunakan jamban untuk melakukan BABS oleh Kepala Desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan observasi awal tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Kecamatan Amuntai Selatan (Desa Panyuruan dan Desa Keramat), hasil observasinya sebagai berikut :

1. Desa Panyuruan

- a. Belum adanya sosialisasi Peraturan Daerah Stop BABS secara optimal oleh pemerintah daerah mengenai kebijakan atau program Stop Buang Air Besar Sembarangan kepada masyarakat, sehingga masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui secara jelas mengenai larangan buang air besar di sungai maupun penggunaan jamban yang tidak sehat. *(Sumber berupa observasi lapangan)*
- b. Terbatasnya anggaran pemerintah daerah atau pemerintah desa tentang pengadaan jamban sehat (WC sehat) kepada masyarakat sehingga masih ada sebagian masyarakat yang belum memiliki WC sehat.
- c. Masih ada yang menggunakan WC cebluk dan jamban di sungai, yang mana terdapat rumah panggung yang dibangun di atas sungai dan

memiliki WC cemplung/cubluk yang pembungannya langsung ke sungai di Desa Panyiuran. (*Sumber berupa observasi lapangan*)

2. Desa Keramat

- a. Masih terdapat perilaku masyarakat yang melakukan buang air besar di sungai. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara administratif desa telah dinyatakan Stop BABS, dalam praktiknya masih terdapat perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya menerapkan penggunaan jamban sehat, walaupun sudah mendapatkan sertifikat dari Pemerintah Daerah yaitu sebagai Desa STBM dan sudah dinyatakan 100% Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS (*Sumber berupa sertifikat*))
- b. Sosialisasi masih belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan upaya yang lebih maksimal dalam meningkatkan kesadaran serta perubahan perilaku masyarakat. Pemerintah desa bersama pihak terkait telah melakukan berbagai upaya sosialisasi mengenai pentingnya Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), baik melalui penyuluhan kesehatan, pertemuan masyarakat, maupun himbauan secara langsung kepada warga. Namun pada kenyataannya, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menggunakan jamban yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu mengubah kebiasaan masyarakat yang sejak lama terbiasa melakukan buang air besar di sungai. (*Sumber berupa observasi lapangan*)

Berdasarkan hal ini kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS) DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DI DESA PANYIURAN DAN KERAMAT)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus-fokus penelitian yang menyatakan pokok-pokok persoalan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang di kutip dalam buku Agustino, (2022:150-153), yakni ;

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Hubungan antar Organisasi
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi
6. Disposisi Implementor.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Di Kecamatan Amuntai Selatan (Studi kasus di Desa Panyaturan dan Keramat)?

2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Di Kecamatan Amuntai Selatan (Studi kasus di Desa Panyiuran dan Keramat)?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin yang dicapai dalam penelitian ;

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Di Kecamatan Amuntai Selatan (Studi kasus di Desa Panyiuran dan Keramat).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Di Kecamatan Amuntai Selatan (Studi kasus di Desa Panyiuran dan Keramat).

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Manfaat Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Ilmu Administrasi Publik.
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teori mengenai Implementasi kebijakan publik, khususnya terkait kebijakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

- c) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan penalaran ilmiah mengenai pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam meningkatkan pelaksanaan program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
- b) Penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat desa dan pihak terkait dalam memperbaiki implementasi kebijakan sanitasi lingkungan di Desa Panyiuran dan Desa Keramat.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji implementasi kebijakan Stop BABS.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Moh. Fajar Noorahman tahun 2020 pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, yang berjudul **"Efektivitas Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Melalui Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara"**. Pengamatan yang dilakukan oleh penulis bahwa: efektivitas Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Melalui Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara tergolong belum efektif ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, pada aspek keberhasilan program dalam hal perilaku hidup sehat warga masyarakat tidak terpenuhi disebabkan masih adanya sebagian warga masyarakat yang melakukan BABS di sejumlah tempat dari karena tidak memiliki jamban di rumahnya. Di samping itu, ditemukan fakta tentang kurangnya pengetahuan sebagian warga masyarakat terhadap dampak yang diakibatkan dari BABS yang mereka lakukan. Kedua, pada aspek keberhasilan dalam hal sasaran pencapaian tujuan masih belum terwujud dikarenakan penyediaan jamban sehat belum mencakup keseluruhan warga masyarakat yang tidak memiliki jamban di rumahnya. Adapun dalam hal tingkat keberhasilan belum terwujud dikarenakan baru sebagian kecil warga masyarakat yang telah menerima bantuan jamban sehat. Ketiga, pada aspek kepuasan terhadap pelaksanaan dalam program Jamban sehat,

dalam hal kebutuhan warga masyarakat selaku pengguna belum cukup memadai dalam hal pendanaan pembuatan jamban sehat sebab dana diberikan secara bertahap sedangkan dalam hal kepuasan warga masyarakat selaku pengguna tergolong rendah dari karena dana pembuatan jamban sehat diberikan secara bertahap. Keempat, pada aspek tingkat perbandingan input dan output diketahui dalam hal besaran anggaran belum memadai untuk membiayai pembuatan keseluruhan jamban sehat. Adapun dalam hal hasil program masih belum terpenuhi dikarenakan dana desa juga diperuntukkan bagi pembangunan fisik lainnya di desa sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan keseluruhan warga masyarakat. Kelima, pada aspek pencapaian tujuan menyeluruh dalam hal sosialisasi sudah pernah diselenggarakan oleh instansi yang terkait sedangkan dalam hal pembinaan terhadap masyarakat dilakukan oleh pihak Puskesmas dibantu aparat desa.

2. Era Fita Lumban Gaul (2018) pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan, yang berjudul **"Pelaksanaan Program STMB Melalui Aksi Berjaga Dalam Rangka Meningkatkan Kepemilikan Jamban Keluarga Dan Perilaku BAB Masyarakat Di Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi"**. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui masalah-masalah dan kendala-kendala dalam implementasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah kuantitatif, jenis penelitian ini merupakan survey yang bersifat deskriptif, untuk mengetahui kepemilikan jamban peneliti melakukan observasi langsung dan untuk mengetahui perilaku BAB diperoleh melalui wawancara secara

langsung dalam bentuk kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan secara umumnya masyarakat telah memiliki jamban keluarga sebesar 86,8%, secara umum pengetahuan sebesar 89,0% kurang baik, sikap kurang baik sebesar 80,2%, tindakan kurang baik sebesar 96,7%. Disarankan kepada petugas kesehatan puskesmas tiga baru kecamatan pegagan hilir untuk meningkatkan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) khususnya perilaku membuang air besar dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat diharapkan mampu untuk mengubah tindakan buang air besar sembarangan

B. Tinjauan Teoritis

1. Konsep Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani “*polis*” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “*politia*” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris “*policie*” yang artinya berkenaan dengan 15 pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya pejabat, suatu kelompok maupun suatu pejabat pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-

pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Makna kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981:1) yang dikutip oleh Uddin B. Sore dan Sobirin (2017:50) adalah:

Apapun pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik menyangkut sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan, oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh ketika pemerintah mengetahui ada jalan raya yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa:

- 1) Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta;
- 2) Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan publik secara sederhana adalah konsep dasar rencana pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Sedangkan secara umum, pengertian kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Segala

sesuatu yang dimaksud adalah setiap aturan atau kehidupan bersama, baik itu hubungan antar warga ataupun warga dengan pemerintah.

Kebijakan publik biasanya diatatur dalam Undang-Undang (UU), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda) merupakan bentuk-bentuk kebijakan publik. kebijakan publik atau kebijakan umum merupakan program-program yang ditetapkan oleh pemerintah dalam arti luas untuk mencapai tujuan masyarakat. Dengan kata lain kebijakan publik adalah suatu keputusan-keputusan dari lembaga berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

b. Tujuan Kebijakan

Tujuan suatu kebijakan dalam buku Kusuma Dewi (2022 : 28-29) dapat dibekas sebagai berikut :

- 1) *Resources* atau sumber daya, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan untuk mendistribusikan sumber daya negara dan yang bertujuan untuk menyerap sumber daya negara.
- 2) Kebijakan *regulatif* dan *deregulatif*, kebijakan *regulative* bersifat mengatur dan membatasi, seperti kebijakan tarif, kebijakan pengadaan barang dan jasa, kebijakan hak asasi manusia, dll. Sedangkan kebijakan *deregulatif* bersifat *liberalisasi*, seperti kebijakan *privatisasi* dan kebijakan penghapusan tarif.
- 3) *Dinamisme* dan stabilitas, kebijakan dinamis adalah kebijakan yang dirancang untuk memobilisasi sumber daya nasional untuk mencapai beberapa kemajuan yang diinginkan, seperti kebijakan

desentralisasi. Pada saat yang sama, kebijakan stabilitas adalah untuk mencegah dinamika yang terlalu cepat agar tidak merugikan sistem yang ada, baik sistem politik, keamanan, ekonomi, maupun sosial.

- 4) Penguatan negara dan pasar, kebijakan yang memperkuat negara merupakan kebijakan yang mendorong peran negara lebih besar, seperti kebijakan pendidikan nasional yang menjadikan negara sebagai aktor utama dalam pendidikan nasional dan bukan masyarakat.

c. Proses Kebijakan

James E. Anderson (2003:23-24) dalam buku Farid Wajdi, Andryan (2022;11) sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan sebagai berikut:

- 1) Formulasi masalah (*problem formulation*):

Apa masalahnya? Apa yang membuat masalah tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?

- 2) Formulasi kebijakan (*formulation*):

Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?

- 3) Penentuan kebijakan (*adaption*):

Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang melaksanakan

kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi kebijakan yang ditetapkan?

4) Implementasi (*implementation*):

Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?

5) Evaluasi (*evaluation*):

Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Sedangkan Michael Howlet dan M. Ramesh (2011:11) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan, sebagai berikut:

- 1) Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah;
- 2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah;
- 3) Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan;
- 4) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yakni proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil;
- 5) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

d. Karakteristik Evaluasi Kebijakan

Dalam buku Agus Subianto (2020 : 9-10) evaluasi yakni suatu evaluasi menghasilkan tuntutan yang bersifat evaluatif. Karenanya evaluasi memiliki sejumlah karakteristik, sehingga berbeda dengan metode kebijakan lainnya, yakni:

- 1) Fokus nilai. Evaluasi tidak sama dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
- 2) Interdependensi fakta nilai. Tuntutan terhadap evaluasi tergantung pada "fakta" ataupun "nilai". Untuk menyatakan bahwa suatu kinerja kebijakan ataupun program tertentu mencapai tingkatan kinerja yang tertinggi (ataupun terendah), maka diperlukan bukan hanya hasil-hasil dari kebijakan yang berharga bagi sejumlah individu, kelompok ataupun seluruh masyarakat.
- 3) Berorientasi Masa Kini dan Lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, dari pada hasil dimasa depan.
- 4) Dualitas nilai. Value yang menjadi basis tuntutan evaluasi memiliki kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan cara.
- 5) Menggunakan kriteria, dalam evaluasi kebijakan diperlukan kriteria atau standar penilaian yang jelas, seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

2. Konsep Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan proses yang begitu kompleks, bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi berbagai kelompok kepentingan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam seluruh struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Implementasi merupakan proses dinamis. Pelaksana kebijakan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga mereka mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*ouput*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Berikut ini dijelaskan mengenai konsep implementasi yang dipaparkan oleh beberapa ahli di antaranya:

Menurut Eugene Bardach (1991) dalam buku Reno, 2023:27 menjelaskan :

"adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatanya bagus diatas kertas, lebih sulit lagi merumuskan dalam kata-kata dan slogan-slogan yang

kedengarannya menenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkan, dan sulit lagi untuk melaksanakan dalam bentuk cara yang merumuskan semua orang termasuk mereka anggap klien."

Menurut Laster dan Stewart Jr dalam buku Reno, 2023:28 menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut

"Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*output*), keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih."

Pendapat tersebut tidak jauh berbeda dengan yang diutarakan oleh Merrile Grindle :

"Pengukuran keberhasilan implementasi dapat diliat dari prosesnya dengan mempertahankan apa pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu meliat pada action program dari *individual project* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai."

Daniel Mazmanian dan Paul Sabastier dalam bukunya *Impiementation and Public Policy* mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut

"Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan

secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya."

Sementara itu, Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai, "Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yakni:

- 1) Adanya tujuan;
- 2) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan;
- 3) Adanya hasil kegiatan

Dalam buku Leo Agustino (2016:128), menurut Van Meter & Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: "Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan."

Implementasi kebijakan menurut Udoji (1981) sebagaimana yang dikutip dalam buku Leo Agustino (2016:129-130) mengatakan bahwa:

"Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan.

Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dilaksanakan.”

Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Dr. Anirwan, 2025:59) ada ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan.

b. Model-Model Implementasi Kebijakan

1) Implementasi Kebijakan Model George C. Edwards III

Menurut George C. Eduard III dalam buku Deddy Mulyadi (2016:68) mengemukakan ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan antara lain :

a) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan

mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b) Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

c) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

implementasi kebijakan Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur eperasi yang standar standard grating procnfures atau SOP).

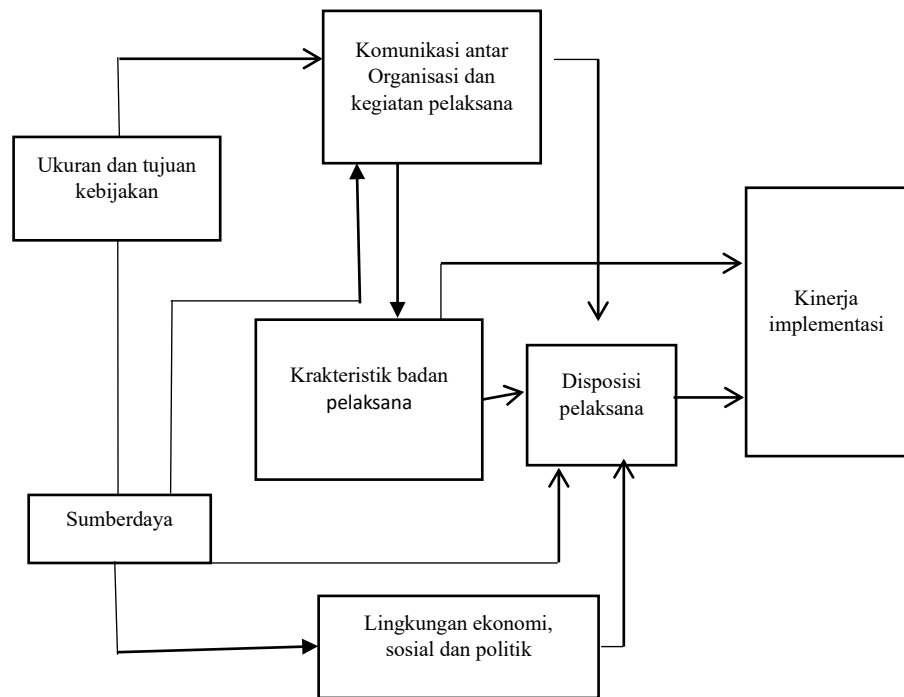
2) Model Implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Siti Marwiyah (2022-39-40) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, antara lain:

- a. Standar sasaran kebijakan dan standar sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat teralisir.
- b. Sumber daya, implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumbe rdaya non manusia.
- c. Hubungan antar organisasi yaitu perlu banyak program implementasi sebuah program dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- d. Karakteristik pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Kemudian semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yakni variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- f. Disposisi implementator adalah mencakup respon implementator tiga hal penting, yaitu: respon implementator

terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementator, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

Gambar 2. 1
Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn



Sumber : Van Meter dan Van Horn, 1975: 463

3) Model Implementasi Merilee S. Grindle

Teori Merilee S. Grindle Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam buku Joko Pramono (2020:6-7) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group,

sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai, sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

- a) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b) Derajat perubahan yang diinginkan.
- c) Kedudukan pembuat kebijakan.
- d) (Siapa) pelaksana program.
- e) Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn (1975) disebut dengan *A Model of the Policy*

Implementation (dalam buku Agustino, 2022:150-153). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengetahuan paham kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik, pelaksana bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel tersebut yaitu :

- 1) Standar dan sasaran kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Hubungan antar Organisasi
- 4) Karakteristik agen pelaksana
- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi
- 6) Disposisi Implementor

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

- a) Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat di realisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara agen implementasi.

- b) Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia

(*non-human resources*). Dalam berbagai kasus pemerintah, seperti Program Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di perdesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.

c) Hubungan antar Organisasi

Dalam banyak program suatu organisasi maka diperlukannya kerjasama yakni berupa koordinasi dan dukungan dari suatu instansi dengan instansi yang saling terkait demi suksesnya suatu implementasi. Jika dukungan sudah sinkron maka suatu keberhasilan yang akan dicapai akan begitu mudah didapatkan. Sebagai lembaga pemerintah dukungan instansi lain sangat berpengaruh besar dalam tujuan yang akan dicapai suatu program itu sendiri.

d) Karakteristik Agen Pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

e) Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang

ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

f) Disposisi Implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni; respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

d. Proses Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, sebagai proses implementasi kebijakan tersebut dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan. Untuk memperoleh hasil seperti yang diharapkan dalam proses keputusan kebijakan perlu melibatkan berbagai unsur, sehingga hasil keputusan akan menghasilkan suatu produk yang menyentuh atau mewakili semua kepentingan. Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan. Dari berbagai karakteristik metode kualitatif, metode kualitatiflah yang paling cocok meneliti keadaan yang bersifat proses. Dalam melakukan penelitian proses implementasi kebijakan, peneliti langsung mengamati, melakukan wawancara kepada pelaksana, pengawas, pengamat kebijakan bagaimana proses kebijakan dilaksanakan. Melalui penelitian ini diharapkan, dapat dikemukakan panduan

pelaksanaan kebijakan prosedur yang terjadi dalam melaksanakan kebijakan dan selanjutnya dibandingkan dengan yang seharusnya. Kesiapan sumber daya manusia dan sumber daya lain dalam melaksanakan kebijakan, membandingkan pelaksanaan kebijakan dengan rencana dan menemukan hambatan-hambatan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan.

3. Pengertian Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

a. Pengertian Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS/*Open defecation*) termasuk salah satu contoh perilaku yang tidak sehat. BABS/*Open defecation* adalah suatu tindakan membuang kotoran atau tinja di ladang, hutan, semak – semak, sungai, pantai atau area terbuka lainnya dan dibiarkan menyebar mengkontaminasi lingkungan, tanah, udara dan air.

b. Bahaya Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

Buang air besar sembarangan dapat mengakibatkan kontaminasi pada air, tanah, udara, dan makanan. Sesuai dengan model ekologi, ketika lingkungan buruk akan menyebabkan suatu penyakit. Penyakit yang dapat terjadi akibat kontaminasi tersebut antara lain tifoid, paratiroid, disentri, diare, kolera, penyakit cacing, hepatitis viral, dan beberapa penyakit infeksi gastrointestinal lain, serta infeksi parasit lain.

Tinja atau kotoran manusia merupakan media sebagai tempat berkembang bibit penyakit menular misalnya kuman/bakteri, virus

dan cacing. Apabila tinja tersebut dibuang sembarang tempat, misalnya di kebun, kolam, sungai, dan lain-lain maka bibit penyakit tersebut akan menyebar luas ke lingkungan, dan akhirnya akan masuk dalam tubuh manusia, dan berisiko menimbulkan penyakit pada seseorang dan bahkan bahkan menjadi wabah penyakit pada masyarakat yang lebih luas.

Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS) akan memberikan manfaat dalam segala hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menjaga lingkungan menjadi bersih, sehat, nyaman dan tidak berbau dan lebih indah.
- 2) Tidak mencemari sumber air atau badan air yang dapat dijadikan sebagai air baku air minum atau air untuk kegiatan sehari-hari lainnya seperti mandi, cuci, dan lain-lain
- 3) Tidak mengundang serangga dan binatang yang dapat menyebarluaskan bibit penyakit, sehingga dapat mencegah penyakit menular.
- 4) Serta meningkatkan masa depan yang lebih baik dan pembangunan berkelanjutan.

c. Manfaat Pembuangan Tinja

Pembuangan tinja merupakan salah satu upaya kesehatan lingkungan yang harus memenuhi sanitasi dasar bagi setiap keluarga. Pembuangan kotoran yang baik harus dibuang kedalam tempat penampungan kotoran yang disebut jamban. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia

yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa (cemplung) yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkan. Jamban keluarga sangat berguna bagi kehidupan manusia, karena jamban dapat mencegah berkembangnya bermacam penyakit yang disebabkan oleh kotoran yang tidak dikelola dengan baik.

Prinsip utama tempat pembuangan tinja atau jamban sehat adalah:

- 1) Jarak tempat penampungan tinja terhadap sumber air > 10 meter, sehingga tidak mencemari sumber air
- 2) Terdapat septic tank
- 3) Tidak mencemari lingkungan (bau)
- 4) Tidak ada kontak dengan vektor
- 5) Konstruksi yang aman
- 6) Sebagai tambahan adalah adanya saluran SPAL, pengelolaan tinja dan milik sendiri.

d. Peran Kader Masyarakat

Kader kesehatan, atau kelompok masyarakat desa yang berkesadaran dan berkepentingan untuk memajukan dan meningkatkan derajat kesehatan mempunyai peran yang sangat penting dalam promosi perilaku stop buang air besar sembarangan, yaitu antara lain :

- 1) Memanfaatkan setiap kesempatan di dusun/desa untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya perilaku buang air besar yang benar dan sehat.
- 2) Melakukan pendataan rumah tangga yang anggota keluarganya masih BAB sembarangan, mendata rumah tangga yang sudah memiliki jamban sederhana dan mendata keluarga yang sudah memiliki jamban yang sudah lebih sehat (jamban leher angsa).
- 3) Mengadakan kegiatan yang sifatnya memicu, mendampingi, dan memonitor perilaku masyarakat dalam menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan, sehingga dalam tatanan dusun/desa terwujud kondisi terbebas dari perilaku buang air besar sembarangan.
- 4) Menggalang daya (bisa tenaga ataupun dana) antar sesama warga untuk memberi bantuan dalam pembangunan jamban bagi warga yang lain. Menjadi penghubung antar warga masyarakat dengan berbagai pihak terkait yang berkepentingan dalam mewujudkan jamban yang sehat.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini di laksanakan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di mana studi kasus yang dilakukan ada di Desa Panyiuran dan Keramat. Maka dari itu implementasi dapat dilihat dari model-model Implementasi kebijakan publik dalam pendekatan yang di teorikan oleh Van Meter dan Van Horn antara lain:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat di realisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur akan terjadi multiinterpretasi dan menimbulkan konflik di antara agen implementasi.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resources*). Dalam berbagai kasus pemerintah, seperti Program Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di perdesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.

3. Hubungan Antar Organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik

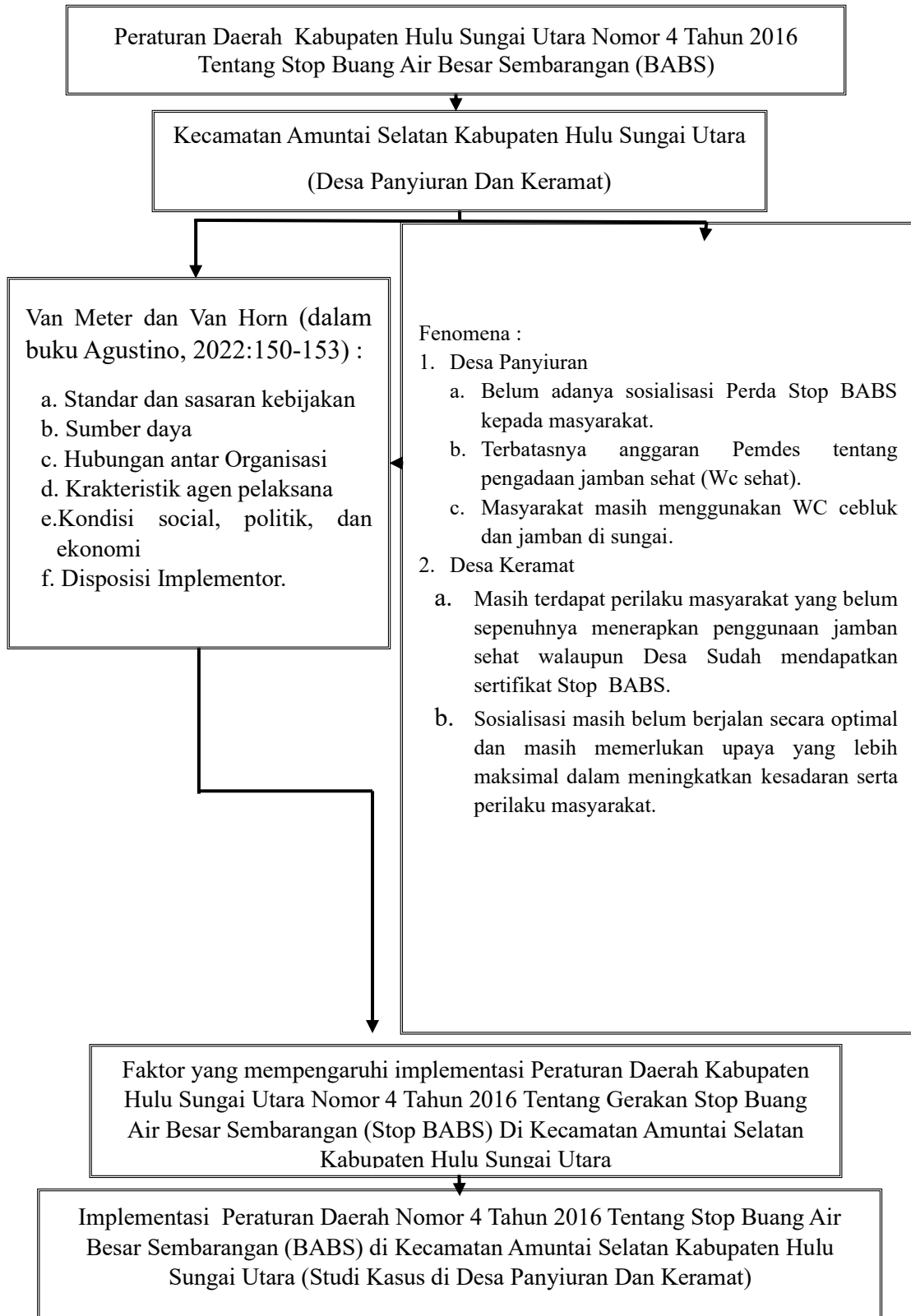
mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi Implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni; (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Dengan adanya permasalahan tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), maka rumusan masalah adalah salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Untuk itu, maka digambarkan dalam kerangka pemikiran yang dirumuskan dalam penelitian berikut ini:

Gambar 2. 2
Kerangka Pemikiran



(Sumber: Diolah penulis, 2026)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Panyiuran dan Keramat di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun alasan yang menjadi pertimbangan pemilihan lokasi ini dikarenakan penulis melakukan observasi sehingga penulis melihat ada permasalahan yang layak untuk diteliti terkait dengan judul yang peneliti angkat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif. Melalui pendekatan ini diharapkan peneliti mampu menghasilkan data yang bersifat deskriptif untuk mengungkap proses terjadi di lapangan.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif, yang mana penelitian menggali informasi melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Tipe penelitian ini dimaksudkan memberikan gambaran secermat dan seakurat mungkin sesuai dengan kenyataan, keadaan dalam objek pada saat penelitian dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Dengan kata lain bahwa menggunakan tipe penelitian deskriptif dalam penelitian ini, akan diperoleh gambaran atau lukisan secara sistematis,

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki sehingga hubungan penelitian dapat tercapai.

D. Data dan Sumber Data

1. Jenis-Jenis Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya. Jadi data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya. (Pasolong, 2016:70)
- b. Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Jadi data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya. Data yang diperoleh dari peneliti lain atau dari catatan dari instansi, atau dari mana saja sudah diolah, merupakan data sekunder. (Pasolong, 2016:70).

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan. (V. Wiratna Sujarweni, 2020:73)

Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi maka sumber data disebut informan. Informan merupakan orang yang di mana peneliti mencari informasi tentang suatu kondisi atau situasi tentang latar belakang penelitian, serta orang yang benar-benar

mengetahui permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* untuk penarikan data, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana para peneliti dengan sengaja memilih partisipan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian mereka, hal ini berguna untuk memastikan sampel mewakili karakteristik atau pengalaman tertentu yang penting untuk studi tersebut. Dengan harapan peneliti dapat memilih secara langsung subjek yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi dari informan, tentunya sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam pengumpulan sumber data, penulis mengambil dari beberapa responden atau informan yang ada di lapangan tempat penelitian yakni ada 13 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1

Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah Informan
1.	Pegawai Puskesmas	1
2.	Kepala Desa Panyaturan	1
3.	Kepala Desa Keramat	1
4.	Aparat Desa Panyaturan	2
5.	Aparat Desa Keramat	2
6.	Masyarakat	6
Jumlah		13

E. Desain Operasional Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Stop Buang Besar Sembarangan (BABS) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Maka dari itu dirancanglah suatu desain operasional penelitian untuk mengukur baik buruknya suatu konsep. Penelitian ini berlandaskan pada teori yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn.

Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam buku Agustino (2022:150-153), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat di realisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara agen implementasi.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resources*). Dalam berbagai kasus pemerintah, seperti Program Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di perdesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.

3. Hubungan Antar Organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu

dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi Implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni; (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Tabel 3. 2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Implementasi Kebijakan Publik Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn (dalam buku Agustino, 2022:150-153)	1. Standar dan sasaran kebijakan	a. Kejelasan tugas kebijakan b. Sasaran kebijakan
	2. Sumber daya kebijakan	a. Sumber daya manusia b. Sumber finansial
	3. Hubungan antar organisasi	a. Dukungan instansi terkait b. Koordinasi antar instansi
	4. Karakteristik agen pelaksana	a. Struktur birokrasi b. SOP
	5. Kondisi sisial, ekonomi, dan politik	a. Kondisi sosial b. Kondisi ekonomi c. Kondisi Politik
	6. Disposisi implementor	a. Respon implementor b. Pemahaman Implementor

(Sumber: Diolah penulis, 2026)

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu pekerjaan penting dan sangat menentukan dalam suatu penelitian. Sebuah penelitian dapat dikatakan berhasil apabila data dapat di kumpulkan.

Teknik data yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sirajuddin Saleh (2023:57-58) Observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati secara langsung sasaran (subyek) penelitian dan merekam

peristiwa serta perilaku secara wajar, asli, tidak dibuat-buat, dan spontan dalam kurun waktu tertentu, sehingga diperoleh data yang cermat, mendalam, dan rinci. Metode digunakan oleh peneliti agar peneliti memperoleh pengalaman langsung dan dijadikan sebagai alat untuk melakukan uji kebenaran.

Selain itu dengan pengamatan, peneliti akan mengalami dan melihat sendiri serta dapat mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi untuk dijadikan sebagai alat yang sangat bermanfaat bilamana teknik komunikasi lain kurang memungkinkan.. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

2. Wawancara

Menurut Sirajuddin Saleh (2023:53-54) Wawancara adalah percakapan antara peneliti dengan informan dengan maksud untuk memperoleh informasi atau data sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kualitatif biasanya dengan wawancara terbuka, diawali dengan peneliti bisa mengajukan pertanyaan yang tidak berstruktur karena pada tahap awal peneliti sendiri tidak tahu apa yang tidak diketahuinya. Artinya informan mendapat kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan buah pikiran, pandangan, dan perasaannya tanpa diatur ketat oleh peneliti. Setelah peneliti memperoleh informasi, maka peneliti dapat

mengadakan wawancara yang lebih terstruktur berdasarkan apa yang telah disampaikan informan tersebut.

3. Dokumentasi

Menurut Sirajuddin Saleh (2023:60-61) Dokumentasi merupakan teknik pembangkitan/pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang dapat memberikan informasi terhadap objek penelitian terutama dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti, baik dokumen berupa catatan penting, peraturan perundang-undangan, naskah, foto-foto, manuskrip, dan dokumen lain yang dapat menunjang. Atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjiaraharjo dalam Wiratna Sujarweni (2022:34) analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga di peroleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

Menurut Miles dan Faisal dalam Wiratna Sujarweni (2022:34) analisis data dilakukan selama pengumpulan data lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif: Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur sebagai berikut:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal penting. Dalam penelitian ini penulis memilih data-data yang diperlukan (penting) dan tidak menggunakan data yang tidak diperlukan, kemudian data diorganisasikan sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir.

2. Penyajian data

Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan yang lainnya. Bentuk penyajian data kualitatif yang penulis lakukan yaitu menyusun sekumpulan informasi berupa teks naratif, tabel dan grafik.

3. Kesimpulan akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi, dalam penelitian kualitatif ini setelah melalui berbagai tahapan seperti yang dijelaskan di atas maka penulis dapat melakukan kesimpulan akhir yang sebelumnya diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara dan setelah pengumpulan data selesai.

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2019:365-371) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam peneliti,

triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.

1. Perpanjangan Pengamatan

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali kelengkapan benar atau tidak. Bila setelah dicek kembali kelengkapan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepatian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis dalam melakukan penelitian.

3. Triangulasi

Menurut Wiliam Wiersma (Sugiyono (2019:365-371)) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

4. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari atau menemukan data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan sebelumnya, maka hal ini akan dapat merubah temuan sebelumnya. Namun jika tidak ada lagi data-data yang

bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditentukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman atau dokumen wawancara. Data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung dengan foto-foto. Alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif ini seperti kamera, *handycam*, alat rekam suara, atau bisa langsung menggunakan handphone android, alat-alat tersebut sangat diperlukan untuk mendukung data yang telah ditemukan oleh peneliti. Agar menjadi bahan sebagai dokumen atau bukti untuk peneliti.

6. Mengadakan *Member check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data atau informan. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya tersebut valid. Proses ini dilakukan dengan cara menunjukkan kembali hasil data atau ringkasan wawancara kepada informan untuk mendapatkan persetujuan atau koreksi, sehingga semakin kredibel/dapat dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, L. (2022). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi terbaru). Bandung: Alfabeta.
- Anderson, J. E. (2003). Public policymaking: An introduction (5th ed.). Boston: Houghton Mifflin.
- Anirwan. (2025). Implementasi kebijakan publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, K. (2022). Kebijakan publik: Konsep dan implementasi. Yogyakarta: Deepublish.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2011). Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems. Oxford: Oxford University Press.
- Lumban Gaul, E. F. (2018). Pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui aksi berjaga dalam rangka meningkatkan kepemilikan jamban keluarga dan perilaku buang air besar masyarakat di Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi
- Moh. Fajar Noorahman, M. F. (2020). Efektivitas program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) melalui gerakan stop buang air besar sembarangan (BABS) di Desa Pawalutan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Skripsi). Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
- Mulyadi, D. (2016). Studi kebijakan publik dan pelayanan publik. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, H. (2016). Metode penelitian administrasi publik. Bandung: Alfabeta.
- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Amuntai: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Saleh, S. (2023). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sore, U. B., & Sobirin. (2017). Kebijakan publik. Makassar: Sah Media.
- Subianto, A. (2020). Evaluasi kebijakan publik. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2020). Metodologi penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. W. (2022). Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wajdi, F., & Andryan. (2022). Kebijakan publik: Proses, implementasi, dan evaluasi. Jakarta: Kencana.
- Wulandari, N. (2025). Implementasi kebijakan publik dalam perspektif administrasi. Yogyakarta: Deepublish.